

PEMIKIRAN PLURALISME KH. ABDURRAHMAN WAHID DALAM MEMBANGUN TOLERANSI (1999-2001)

Oleh: Yoga Oktarianda

Email: yogaoktarianda@gmail.com

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisip, Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research is about KH. Abdurrahman Wahid's pluralism tough in building tolerance from 1999 to 2001. The purpose of this research is to find out the pluralistic thinking of KH. Abdurrahman Wahid in attitude towards diversity in society like religion, views, race, nation, culture and other differences from one human to another. The fight KH. Abdurrahman Wahid in establish pluralism is not just a discourse and theory but also at the level of practice which is reflected in his policies and actions. However, in reality, he often creates controversy and got a lot criticism from various circles, even though he continues to campaign for pluralism until the end of his life, in the name of building tolerance.

This study uses a library research method with a historical - philosophical approach.

The result of this research is in Indonesia pluralism is still a sensitive discourse and controversy. For those who are pro, pluralism is an inevitability from Allah SWT. Therefore, pluralism must be accepted and become a necessity. Meanwhile, for those who are contra, pluralism is understood as misguided understanding because teaches all religions is same and true. In this case KH. Abdurrahman Wahid became one of the figures who was pro against pluralism. For KH. Abdurrahman Wahid pluralism is not a negative concept. Pluralism is in line with Islamic values, Pancasila and also the state constitution. For him, pluralism is a fact and is a necessity because of the primordial differences between humans into various religions, races, ethnicities, nations, languages which cannot be avoided and all must be treated equally in all dimensions of national and state. Pluralism of KH. Abdurrahman Wahid divided into three things; Justice, freedom of religion, and freedom of thought or opinion freedom as a human right. In their efforts to uphold pluralism in society, they often got pros and contras. Many agree and there are also many who disagree. Therefore, he has received many obstacles from various groups or organization, including the Majelis Ulama Indonesia (MUI) which states that Pluralism is haram because it considers all religions to be the same.

Keywords : Political thought, Pluralism, Tolerance

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Pluralisme telah menjadi salah satu isu kontemporer yang ramai dibicarakan di Indonesia akhir-akhir ini. Diskursus mengenai pluralisme semakin marak di kalangan umat Islam Indonesia. Organisasi-organisasi sosial agama terbesar di Indonesia seperti NU, Muhammadiyah dan MUI tak luput dalam dialektika mengenai pluralisme ini. Secara umum terbentuk dua kubu antara yang setuju dan yang tidak setuju dengan pluralisme. Dari kalangan NU, seperti KH. Abdurrahman Wahid, Nurcholis Madjid, adalah para tokoh utama penyebaran paham pluralisme. Melihat dari sudut pandang MUI yang memberi respon penolakan yang serius terhadap wacana pluralisme agama, serta dianggap mengancam teologi Islam itu sendiri. Sebab MUI bukan hanya menilai ide pluralisme agama itu sesat, melainkan mereka menghukuminya dengan label haram. Menurutnya para pengusung paham pluralisme tidak dapat menghargai pluralitas keberagaman. Ia menambahkan bahwa paham pluralisme dapat menjadi virus yang berbahaya karena menganggap semua agama sama dan benar (Biyanto, 2009:250). Syamsul Hidayat mengatakan bahwa pluralisme merupakan paham yang mengajarkan relativisme kebenaran dan tidak mau mengakui eksklusivitas kebenaran agama Islam. Pluralisme, sekularisme dan liberalisme dapat menggusur agama. Beliau menolak pluralisme karena dianggap membenarkan akidah yang batil dan mencampuradukkan yang benar dan yang salah. Adapun pluralitas budaya beliau menerimanya selama tidak bertentangan dengan akidah, syariah dan akhlak Islam. Terakhir beliau menutup pernyataannya dengan mengatakan bahwa pluralisme bertentangan dengan manhaj Muhammadiyah yang memiliki

semangat kembali kepada al Qur'an dan sunnah" (Biyanto, 2009:251). Ahmad Khoirul Fata mengatakan pluralisme bermakna filosofis yang berkaitan dengan relativisme kebenaran. Pluralisme agama sama dengan paralelisme agama karena semua agama dipandang memiliki kebenaran yang sama. Dalam ranah sosial, pluralisme menunjuk pada masyarakat yang pluralistik. Beliau mengatakan dalam pengertian filosofis, pluralisme agama harus ditolak karena dapat menjebak manusia pada agnotisisme, nihilisme, dan ateisme. Menurutnya pluralisme agama yang dikembangkan oleh kelompok Islam liberal tidaklah memiliki basis argumen yang kuat" (Biyanto, 2009:251).

Dalam konteks tersebut, menarik diamati mengenai pluralisme terkhusus mengenai pemikiran pluralisme KH. Abdurrahman Wahid, dimana beliau dikenal sebagai ikon pluralisme dan juga sebagai bapak pluralisme. Hal ini yang akan disoroti penulis dalam penelitian ini dengan mencoba menguraikan pemikiran KH. Abdurrahman Wahid tentang pluralisme, mengapa KH. Abdurrahman Wahid? Penulis memilih karena KH. Abdurrahman Wahid atau yang kerap disapa Gus Dur diakui sebagai tokoh pluralisme nasional bahkan mendapatkan pengakuan dunia internasional sebagai pejuang pluralisme (Basuni, 2016:1). Beliau adalah sosok muslim yang gigih memperjuangkan nilai-nilai kebhinekaan, hak asasi manusia, toleransi dan kesetaraan hak warga negara. Pluralisme dalam pandangan KH. Abdurrahman Wahid adalah menghargai perbedaan, bukan menyamaratakan yang berbeda. Jika dipetakan pemikiran KH. Abdurrahman Wahid mengenai pluralisme secara garis besar terbagi menjadi 3 hal yaitu; (1).keadilan, (2).kebebasan beragama,

dan (3).kebebasan berpendapat sebagai hak asasi manusia(Basuni, 2016:71).

Dari pemikiran pluralisme nya tersebut diwujudkan dalam kebijakan - kebijakan dan tindakan-tindakan pada masa pemerintahan-nya. Namun Kebijakan - kebijakan dan tindakan tindakannya tersebut dianggap kontroversial, menuai pro dan kontra sehingga kerap kali mendapatkan kritik dari berbagai kalangan termasuk umat islam sendiri sebagai mayoritas. Dia dituduh sekuler, pengkhianat umat, dan tidak membela umat islam(Zastrouw, 1999:269), meski demikian pluralisme tetap dikampanyekan oleh beliau hingga akhir hayatnya (Rumadi, 2010:16). Terlihat bahwa obsesi Gus Dur cukup kuat untuk melakukan perubahan dalam masyarakat. Hal ini tercermin dari sikap - sikapnya yang terkesan radikal dan kontroversial (Zastrouw,1999:270).

Dari pemaparan latar belakang diatas menarik untuk dilakukan penelitian mengenai pemikiran KH. Abdurrahman Wahid terhadap pluralisme. Pluralisme yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gagasan - gagasan KH. Abdurrahman Wahid dalam upaya menyikapi keberagaman di masyarakat seperti agama, pandangan, ras, budaya dan perbedaan lainnya dari manusia satu dengan lainnya demi membangun toleransi periode 1999 hingga 2001. Dengan begitu judul penelitian yang sesuai untuk menggambarkan adanya hal tersebut penulis mengambil judul "Pemikiran Pluralisme KH. Abdurrahman Wahid Dalam Membangun Toleransi Tahun 1999 – 2001"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dimuat diatas rumusan masalahnya adalah :

Bagaimana pemikiran pluralisme KH. Abdurrahman Wahid dalam

membangun toleransi tahun 1999 – 2001 ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan bagai-mana pemikiran pluralisme KH. Abdurrahman Wahid dalam membangun toleransi tahun 1999 – 2001 ?

D. Manfaat Penelitian

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran dan juga khazanah baru terkait dengan masalah terkait pluralisme di Indonesia khususnya pemikiran KH Abdurrahman Wahid.
- 2) Memberikan pemahaman bagi para pembaca mengenai masalah terkait pluralisme di Indonesia khususnya pemiki-ran KH Abdurrahman Wahid.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Teori

Pluralisme

Menurut Eboo Petel (DeMott, 2013:57) untuk membangun pluralisme yang ideal dibutuhkan adanya pluralisme yang mengandung 3 hal yakni;

- 1) Menghormati identitas orang lain
- 2) Menjalin hubungan yang positif dengan berbagai komunitas
- 3) Adanya komitmen bersama untuk menciptakan kebaikan(DeMott, 2013:57).

Menurut Alwi Shihab (Shihab, 1999: 41-42) untuk memahami pluralisme dengan benar, perlu diketahui konsep pluralisme meliputi :

- 1) Pluralisme adalah keterlibatan aktif terhadap kenyataan majemuk;
- 2) Pluralisme bukanlah kosmopolitanisme yang merujuk kepada realitas keanekaragaman suku bangsa dan agama tetapi tidak ada interaksi positif antar kelompok tersebut;
- 3) Pluralisme bukanlah relativisme;

- 4) Pluralisme juga bukan sinkritisme yang cenderung melahirkan kepercayaan atau keyakinan baru. Oleh karena itu, perlu dibangun pemahaman pluralisme dengan benar, pluralisme tidak bertujuan untuk membangun keseragaman bentuk agama.

Toleransi

Menurut Tillman, toleransi adalah saling menghargai melalui pengertian dengan tujuan kedamaian. Toleransi adalah metode menuju kedamaian. Toleransi disebut sebagai faktor esensi untuk perdamaian dan kesetaraan. Pada intinya toleransi berarti sifat dan sikap menghargai yang ditujukan pada siapa saja yang dapat menjaga menjaga dan merawat kesetaraan dan keharmonisan. Dalam toleransi terdapat butir-butir refleksi, yaitu (Tillman, 2004:94):

- 1) Menyediakan kesempatan untuk menemukan dan menghapus stigma yang disebabkan oleh kebangsaan, agama dan apa yang diwariskan.
- 2) Toleransi adalah saling menghargai satu sama lain melalui pengertian.
- 3) Benih dari intoleransi adalah ketakutan dan ketidakpedulian
- 4) Benih dari toleransi adalah cinta, yang disirami dengan Kedamaian adalah tujuan, toleransi adalah metodenya
- 5) Toleransi adalah terbuka dan reseptif pada indahnyaperbedaan
- 6) Toleransi menghargai individu dan perbedaannya, menghapus topeng dan ketegangan yang disebabkan oleh ketidakpedulian. kasih dan pemeliharaan
- 7) Jika tidak cinta tidak ada toleransi
- 8) Yang tahu menghargai kebaikan dalam diri orang dan situasi memiliki toleransi
- 9) Toleransi juga berarti kemampuan menghadapi situasi sulit

- 10) Toleransi terhadap ketidaknyamanan hidup dengan

membiarkan berlalu, ringan, membiarkan orang lain ringan.

- 11) Melalui pengertian dan keterbukaan pikiran, orang yang toleran memperlakukan orang lain secara berbeda dan menunjukkan toleransinya. Akhirnya, hubungan yang berkembang.

F. Pemikiran Pluralisme KH. Abdurrahman Wahid

1. Pluralisme

Sebagai sebuah gagasan, pluralisme tidak seragam, sebagaimana pluralisme dalam kenyataan (Iswahyudi, 2016:27-28). Baik sebagai kenyataan dan sebagai gagasan, pluralisme telah menunjukkan dirinya sendiri sebagai sesuatu yang tidak seragam. Ia mengandung kejamakan dan perbedaan, lawan dari ketunggalan dan persamaan. Hubungan jamak dan tunggal dalam kajian keagamaan, menentukan pandangan teologis, antropologis sekaligus kosmologis.

Mengutip dalam buku Pluralisme Islam Pribumi oleh Dr. Iswahyudi, M. Ag Pluralisme dikategorikan menjadi 2 yakni pluralisme alamiah dan pluralisme religius. Adapun hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Pluralisme Alamiah

Pluralisme alamiah adalah sebuah pandangan tentang pluralitas alam semesta sebagai bagian dari kosmos yang teratur. Pluralisme alamiah merupakan penjelmaan dari kesadaran manusia tentang kebhinekaan dalam ranah sosial, ekonomi, politik dan budaya. Dari sisi politik, menurut Ka'bah, pluralisme berkembang menjadi teori politik untuk mengatur kehidupan bersama.“, Secara sosiologis

masyarakat telah terbentuk dalam strukturstruktur sosial yang berbeda.

- b) Pluralisme Religius. Penggunaan kata “religius” dan bukan “agama” dalam sub judul tersebut dimaksudkan untuk menampung berbagai perbedaan setiap pengalaman keberagamaan seseorang ketika bersama Sang Tuhannya. Semua agama bagi sikap pluralis dapat beroperasi sesuai apa adanya tidak harus melebur ke dalam agama lain atau mencampurkan agama satu dengan agama lain, tetapi hubungan antaragama adalah ibarat pelangi. Ibarat pelangi, walau beraneka warna, pada hakikatnya memiliki warna dasar yang sama dan satu yaitu putih. Semua warna berasal dari warna putih lewat “pembelokan”. Agama pada dasarnya berasal dari yang sama dan satu lalu mengejawantah dalam beragam agama. Sikap paralelis oleh karena itu, sesuai dengan sikap pluralis ini. Berbagai warna dalam pelangi adalah gambaran dari eksoterisme agama, sedangkan warna putih yang menjadi dasar dari semua warna adalah aspek primordial truth (kebenaran primordial) atau aspek esoteris dari agama“(Iswahyudi, 2016:46-51).

2. Kontra Pluralisme

Bagi kelompok pro pluralisme, pluralisme adalah sesuatu yang inheren dalam Islam. Tidak saja teks kitab suci telah menyebutnya, tetapi kitab suci menjadi daya dorong bagi timbulnya pluralitas tersebut. Namun, argumen ini, bagi kelompok kontra pluralisme Islam, mengandung banyak kelemahan. Setidaknya berbagai alasan berikut disuguhkan oleh mereka yang menentang pluralisme Islam:

Pertama, pluralisme bagian dari infiltrasi Barat. Hamid Fahmi Zarkasyi menyebut bahwa peradaban Barat terutama posmodern adalah peradaban

yang menentang atas segala macam objektivisme.

Ide tentang pluralisme bagi Fahmi Zarkasyi adalah proyek Barat yang disusupkan ke dalam umat Islam.

Kedua, pluralisme merupa-kan bagian dari upaya kristenisasi. Adian Husaini menjelaskan bahwa misi kristen di antaranya meng-gunakan paham pluralisme.

Ketiga, pluralisme merupa-kan talbis iblis. Dengan bahasa lain, Syamsuddin Arif, alumni ISTAC Malaysia, menyebut talbis iblis dengan diabolisme yang diartikan dengan pemikiran, watak dan perilaku ala iblis ataupun pengabdian padanya. Iblis bukan ateis, bukan pula mengingkari Tuhan, tetapi iblis mengingkari kebenaran. Iblis membangkang perintah Tuhan.

Keempat, kecenderungan-kecenderungn pluralisme agama bertentangan dengan Islam. Di antara kecenderungan pemikiran dan tindakan pluralisme agama adalah seperti humanisme sekular, teologi global, sinkretisme dan hikmah abadi.

3. Pluralisme KH. Abdurrahman Wahid

Komitmen Gus Dur dalam menegaskan nilai-nilai pluralisme di Indonesia merupakan pemaknaan ajaran Islam sebagai agama rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam). Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang kepada pemeluknya. Atas dasar itulah, maka Islam sangat menentang adanya kekerasan dan diskriminasi terhadap sesama manusia. Yang membedakan Gus Dur dengan pejuang pluralisme lain adalah keberaniannya dalam menyuarakan aspirasi-aspirasinya meskipun harus berseberangan dengan situasi yang mainstream di tengah masyarakat

bahkan berseberangan dengan penguasa sekalipun. Ia tetap gigih membela hak-hak kaum minoritas bahkan di cap sebagai pembela kaum minoritas.

Pluralisme Gus Dur tidak sebatas wacana. akan tetapi ia membuktikannya pada wilayah praktek dilapangan, baik ketika ia menjadi presiden Indonesia dengan kebijakan kebijakan yang cukup kontroversi maupun ketika menahkodai organisasi masyarakat islam terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama (NU). Pluralisme bagi Gus Dur bukanlah mencampur-adukkan agama atau Sinkretisme. Pola pikir yang mengarah pada sinkritisme agama ini tidak menghargai keunikan beragama. Pola pikir ini menentang pereduksian nilai nilai luhur agama, apalagi meleburkan satu agama dengan agama lainnya, demikian juga meyamakan atau menganggap agama itu satu, yang berani singularisme.

Yang dituntut Gus Dur bukanlah menyamakan semua agama, tetapi bentuk pengakuan kesetaraan agama di satu pihak dan perlakuan adil non diskriminatif dari Negara.

4. Konsep Pemikiran Pluralisme KH. Abdurrahman Wahid

1) Keadilan

Abdurrahman Wahid mesandarkan pengertian keadilan pada istilah-istilah yang termaktub dalam al-Qur'an seperti adl, qisth, hukm. Menurutnya ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan dalam al-Qur'an dari akar kata adl itu, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan "hendaklah kalian menghukumi atau mengambil keputusan atas dasar keadilan" (Wahid, 2007:349). Secara keseluruhan, pengertian-pengertian di atas terkait langsung

dengan sisi keadilan, yaitu sebagai penjabaran bentuk-bentuk keadilan dalam kehidupan. Dari terkaitnya beberapa pengertian kata 'adl dengan wawasan atau sisi keadilan secara langsung itu saja, sudah tampak dengan jelas betapa porsi "warna keadilan" mendapat tempat dalam al-Qur'an. Hal ini bisa dilihat dalam .al Qur'an Surat an-Nahl (16):90.

2) Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama bagi Abdurrahman Wahid merupakan hak asasi manusia sebagai fitrah dasar, terlebih Indonesia sudah meratifikasi Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (HAM)-(Universal Declaration of Human Right) yang ditetapkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948 (Wahid, 2006:127).

Bagi Abdurrahman Wahid ajaran agama itu akan berlaku sepanjang zaman, jika didalamnya dilibatkan penafsiran-penafsiran yang tidak hanya melibatkan teks, tapi juga melibatkan kontekstual, sehingga tidak memandang mutlak hasil penafsiran, karena bagi Abdurrahman Wahid yang mutlak hanya Allah, dan bagi Abdurrahman Wahid pula ajaran agama yang mutlak yaitu hanya tentang ketuhanan (tauhid) dan kerasulan (Allah dan Rasul Nya) beserta hukum muhkamat (Wahid, 2006:122).

3) Kebebasan Berfikir

Manusia sebagai mahluk yang berfikir, sehingga Abdurrahman Wahid mengatakan: "kancanah intelijensia itu milik bersama umatmanusia"(Wahid, 2007:309). Menurutnya, tugas pokok intelektual adalah mempertahankan kebebasan berpikir, bukanya membunuh kebebasan berpikir. Karena kejujuran intelektual sangat penting dan tanpa itu bukanlah keintelektualan. Intelektualisme hanya muncul dari kebebasan berpikir. Konsekwensinya

kita tidak boleh “giring - giring” atau demi efektivitas harus ada keseragaman pendapat. Hargai pula pluralitas dengan menganggap mereka yang berada di luar sebagai orang mandiri.

Keintelektualan menurut Abdurrahman Wahid bersipat terbuka, sehingga tidak bisa menyatakan: “bahwa hanya Islam sumbangannya lebih besar dari yang lain. Tentang kecintaan, kasih sayang, penghargaan yang tulus kepada umat manusia, apapun agama atau keyakinannya pada dasarnya sama-sama mengabdikan kepada manusia. Hanya ajarannya yang berbeda. Karena itu tidak bisa kita memenangkan diri sendiri lantas menyalahkan orang lain. Ia baru dikatakan intelektual kalau dapat mengutarakan gagasannya dalam kemanusiaan yang sama” (Wahid, 2007:310). Teks pemikiran Abdurrahman Wahid di atas jelas tampak adanya penghargaan atas pemikiran. Baginya pemikiran itu harus dilandasi keterbukaan tidak boleh tersekat oleh dinding pemisah seperti keyakinan dan ideologi. Apalagi jika pemikiran itu menyangkut mulai kemanusiaan. Abdurrahman Wahid juga mengemukakan kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak boleh dipreteli.

5. Pelaksanaan Pemikiran Pluralisme KH. Abdurrahman Wahid Dalam Membangun Toleransi Tahun 1999-2001

a) Kebijakan Terhadap Etnis Tionghoa dan Agama Konghucu

Lewat Keppres RI No. 6/2000, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mencabut inpres yang memarginalkan etnis Tionghoa di segala bidang dan hanya menjadikan etnis Tionghoa sebagai binatang ekonomi. Lewat Keppres itulah, Gus Dur

memberikan kebebasan bagi etnis Tionghoa untuk merayakan Imlek di bumi khatulistiwa ini.

Alasan pembelaan Abdurrahman Wahid pada Khonghucu disampaikannya pada saat ia bertemu dengan Presiden Sung Kyu Kwan Majelis Agama Khonghucu Korea Selatan, Choi Gean Deuk. Abdurrahman Wahid menyampaikan: *Pertama*, karena manusia diciptakan berbangsa-bangsa agar saling bersilatullahi, bukan untuk saling berperang atau bermusuhan. *Kedua*, kehadiran Islam adalah rahmat bagi semesta. Perbedaan ras, keyakinan, budaya dan lain-lain adalah rahmat dan karunia dari Tuhan yang harus disyukuri sebagai kebesaran Tuhan. *Ketiga*, pentingnya menghormati dan menjunjung tinggi kemanusiaan. *Keempat*, Abdurrahman setuju dengan prinsip “apa yang diri sendiri tidak inginkan, jangan diberikan kepada orang lain.” Bagi Abdurrahman Wahid sudah menjadi kewajiban mayoritas melindungi dan menghargai minoritas, sebagaimana agama Islam minoritas di Korea Selatan yang layak pula untuk dihargai oleh penganut Khonghucu sebagai mayoritas (Iswahyudi, 2016:292-293). Kebijakan Gus Dur terhadap masyarakat keturunan Tionghoa tersebut tak lepas dari namanya pro dan kontra. Bagi yang kontra terhadap kebijakan tersebut menganggap masyarakat cina di Indonesia memiliki kebebasan yang menguntungkan terutama dari segi ekonomi dibandingkan masyarakat pribumi di Indonesia. Hampir seluruh masyarakat pribumi merasa dirugikan dengan kenyataan itu. Hal ini tidak ada kaitannya dengan sentimen kalangan Islam fundamentalis (Waskito, 2010:70). Gus Dur menentang program pemberdayaan ekonomi Ummat, karena dinilai memusuhi bisnis Cina. Bagi Gus Dur, pemberdayaan ekonomi

Ummat bisa ditempuh melalui kerjasama dengan etnis Cina yang memang mendominasi perekonomian nasional. Sebagai langkah kongkritnya, Gus Dur menggandeng Bank Summa membentuk jaringan BPR NU-Summa yang menargetkan pembangunan 2000 BPR. (Suara Merdeka, 21 Oktober 1999) (Waskito, 2010:43).

b) Usulan mencabut TAP MPRS No XXV/ 1966

Gus Dur membuka cakrawala masyarakat agar lebih toleran terhadap ajaran atau paham politik mana pun. Ini ditunjukkannya dengan usulan mencabut Tap MPRS No XXV/ 1966 soal pembubaran Partai Komunis Indonesia dan pelarangan penyebaran ajaran marxisme, komunisme, dan leninisme. Selama Orde Baru, Tap MPRS telah menjadi sandaran berbagai peraturan perundangan yang diskriminatif. Penduduk usia di atas 60 tahun di DKI mendapat KTP seumur hidup. Kebijakan itu diambil agar tidak merepotkan warga lanjut usia. Namun, bagi mereka yang tersangkut G30S, ketentuan itu tidak berlaku. Untuk pemilihan anggota legislatif (berlaku mulai tahun 2009), pasal diskriminatif yang melarang mereka yang tersangkut G30S untuk dicalonkan dicabut Mahkamah Konstitusi.

Kebijakan ini tidak terlepas dari pro dan kontra dari berbagai kalangan, bahkan sebagian besar pihak lain (kontra) menyatakan keberatan terhadap pencabutan ketetapan itu dan berargumen bahwa K.H. Abdurrahman Wahid akan membangkitkan kembali PKI (Partai Komunis Indonesia)(Gatra, 24 Juni 2000, Hal. 24). Pencabutan Tap MPRS Nomor XXV/1966 itu bertentangan dengan hati nurani masyarakat Indonesia yang masih trauma atas kekejaman PKI.

c) Menjalin Hubungan Dengan Israel

Hubungan dagang antara Indonesia dan Israel yang digagas oleh Gus Dur menurut M. Ibrahim Hamdani (2013) sepenuhnya bertujuan untuk sebesar - besarnya kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia serta sebagai media

bagi RI untuk terlibat penuh dan ikut serta secara aktif dalam upaya mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina. Dalam percakapan antara Gus Dur dengan Presiden Soka Gakkai Internasional, Daisaku Ikeda, mantan presiden RI keempat itu mengungkapkan beberapa alasan utama yang menjadi latar belakang kebijakannya agar Indonesia membuka hubungan perdagangan dengan Israel. *"Saya selalu berpikir, selama ini negara kami telah lama berhubungan dengan Uni Soviet dan Cina yang tidak mengizinkan warga negaranya memeluk agama. Saya menganggap perlu diusahakan mencari kunci pembinaan hubungan dengan negara manapun, tanpa memandang bagaimana latar belakang masa lampau, maupun seberapa jauh kesulitan masalah yang ada diantara negara tersebut dengan negara kami,"* ujar Gus Dur kepada Daisaku Ikeda sebagaimana tertulis dalam buku KH Abdurrahman Wahid & Daisaku Ikeda, Dialog peradaban untuk Toleransi dan Perdamaian. Hal ini menunjukkan bahwa Gus Dur ingin agar Indonesia melakukan hubungan interaktif dan berkomunikasi secara aktif kepada seluruh negara yang ada di dunia ini tanpa kecuali, baik dalam bentuk hubungan diplomatik, dagang, militer maupun jenis hubungan-hubungan antar negara lainnya. Apalagi Israel bukanlah negara ateis seperti halnya Cina, Vietnam, Kuba, Korea Utara, dan Uni Soviet, melainkan negara demokrasi yang secara formal berbentuk sekuler,

tetapi sangat dipengaruhi oleh peradaban agama Yahudi, sehingga dari sudut pandang ini tidaklah bertentangan dengan Pancasila. "Bahkan selama ini saya telah berulang kali mengadakan kunjungan ke Israel, walaupun saya mengetahui adanya berbagai penentangan dan kritikan," ujar Gus Dur kepada Daisaku Ikeda. Almarhum Gus Dur memang dikenal publik termasuk pihak yang pernah beberapa kali berkunjung ke Israel guna mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina serta membina hubungan kultural, religius, budaya dan akademis dengan Israel demi seutuhnya kepentingan bangsa Indonesia (Cahyo, 2014:127-128). Namun Akibat kebijakannya ini tak banyak Gus Dur menyulut banyak pihak, gagasan tersebut banyak menuai protes, terutama dari kalangan umat Islam. Israel sampai saat ini masih melakukan penjajahan terhadap Palestina dan mengacu kepada UUD 1945 bahwa "penjajahan di atas dunia harus dihapuskan" (Cahyo, 2014)

d) Pembelaan Terhadap Hak Ahmadiyah dan Syi'ah

Abdurrahman Wahid juga menentang terhadap diskriminasi aliran keagamaan seperti Ahmadiyah dan juga Syi'ah. Dalam masalah Ahmadiyah, Abdurrahman Wahid menolak fatwa sesat Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurut Abdurrahman Wahid fatwa tersebut adalah tindakan melawan hukum. Dalam negara Indonesia yang mengikuti dar al-sulh (negara damai), menurutnya, tidak ada pihak yang dapat memaksakan fatwa atas umat, termasuk MUI. (Iswahyudi, 2016:299). Dalam negara yang bukan negara Islam, kekerasan atas nama apapun tidak dilegalkan. Abdurrahman Wahid ingin memper-jelas konstitusi ini. Abdurrahman Wahid selalu melindungi Ahmadiyah dari kekerasan di mana

negara tidak lagi memiliki kekuasaan. Abdur-rahman Wahid membedakan antara urusan negara dengan akidah. Secara akidah, ia tidak setuju dengan Ahmadiyah, namun sebagai warga negara yang berlandaskan UUD 1945, para penganut Ahmadiyah memiliki hak untuk hidup di Indonesia.

Seperti biasanya, tindakan-tindakan Gus Dur kerap menuai pro dan kontra. Dari pihak kontra tindakan Gus Dur terhadap syiah ataupun ahmadiyah tersebut banyak menuai kecaman dari berbagai kalangan, salah satunya ialah; Mungkin FPI dan kawan-kawan dianggap sebagai penindas Ahmadiyyah. Harus dipahami, Ahmadiyyah itu membawa dan menyebarkan agama yang membahayakan ajaran Islam. Mereka meyakini, bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi. MUI sudah memfatwakan, bahwa Ahmadiyyah sesat. Bukan hanya MUI, tetapi juga dewan-dewan fatwa dunia Islam. Apakah keberadaan sekte yang merongrong akidah Islam itu akan dibiarkan saja? Itu berarti membiarkan kelompok sekte kecil ingin merusak ajaran Ahlus Sunnah Wal Jamaah kelompok Muslim mayoritas. Apakah hal ini bukan dianggap sebagai penindasan minoritas terhadap mayoritas? Jika bangsa Indonesia bisa menerima keberadaan Ahmadiyyah yang merongrong akidah Islam, apakah negara juga akan menerima jika kemudian muncul orang-orang yang menyebarkan ideologi permusuhan terhadap konsep Pancasila, konsep UUD 1945, konsep NKRI, dan lainnya? Bolehkah ada Yang menyebarkan konsep Pancasila tandingan? (Wijoyo, 1997:83).

6. Analisis Dari Pluralisme KH. Abdurrahman Wahid Dalam Membangun Toleransi Di Indonesia

Penulis berusaha mengulik bagaimana pemikiran pluralisme oleh KH. Abdurrahman Wahid yang sebenarnya, dari adanya fenomena tersebut yang tidak sedikit mempertanyakan pluralisme beliau sebenarnya. Karna yang kita ketahui pluralisme dapat diartikan dari sudut pandang manapun sehingga banyak menimbulkan kesalah pahaman. Oleh sebab itulah penulis berusaha menguraikan hal tersebut dengan menggunakan Teori Pluralisme oleh Eboo Petel dan Alwi Shihab sebagai indikator dalam penelitian ini.

Teori Pluralisme dari Eboo Petel yakni untuk membangun pluralis-me yang ideal itu dibutuhkan adanya pluralisme yang menggandung 3 hal (DeMott, 2013:57), yakni;

Menghormati Identitas Orang Lain, Pluralisme oleh KH. Abdurrahman Wahid telah berhasil ditunjukkan dalam sikap dan tindakannya dalam mewujudkan pluralisme yang membangun toleransi di indonesia, hal ini dapat kita ketahuinyakni; Gus Dur mengorbankan dirinya untuk melindungi minoritas . Tak jarang sikap Gus Dur itu mengantarkannya pada kritikan bahkan perlawanan dari lingkungan terdekatnya. Puncaknya ketika Gus Dur menjadi orang nomor satu di Indonesia, dalam waktu singkat kebijakan-kebijakan pro-minoritas pun ia lahirkan. Salah satunya yaitu Gus Dur berikhtiar mencabut TAP MPRS No. XXIX/MPR/1966 yang melarang Marxisme - Leninisme, juga menghapus Inpres Nomor 14/1967 yang telah berpuluh-puluh tahun melarang segala kegiatan berbau etnis Tionghoa. Gus Dur adalah seorang humanis, nasionalis dan Muslim. Karena itu ia bisa mene-rima, mengakui, serta menghormati beragam identitas.

Menjalin Hubungan Yang Positif Dengan Berbagai Komunitas

Hal ini tercermin dari cara Gus Dur menjalin hubungan dengan berbagai kelompok atau komunitas tanpa memandang eksklusivisme suku atau agama. Meski dikenal sebagai tokoh Muslim, Gus Dur dikenal sebagai figur yang mampu bersikap fleksibel dalam membangun hubungan sosial dengan tokoh-tokoh non-Muslim. Ia bersahabat dengan banyak pastor, pendeta, dan tokoh-tokoh agama lain, baik itu dari Buddha, hindu, konghucu dan lain-lain. beliau berusaha menjadikan perbedaan-perbedaan yang ada untuk saling berkerjasama antar sistem keyakinan untuk menangani masalah masyarakat dan menciptakan kesejahteraan lahir (keadilan dan kemakmuran).

Adanya Komitment Bersama Untuk Menciptakan Kebaikan

Komitmen KH. Abdurrahman Wahid untuk menciptakan kebaikan merupakan caranya dalam menegaskan nilai-nilai pluralisme di Indonesia yang merupakan pemaknaan ajaran Islam sebagai agama rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam). Yang mana Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang kepada pemeluknya. Sehingga hal itu lah yang membuat ia menentang adanya kekerasan dan diskriminasi terhadap sesama manusia. Adanya berkomitment KH. Abdurrahman Wahid untuk menciptakan kebaikan melalui pelaksanaan pemikiran pluralismenya, dapat diketahui dalam beberapa sikap dan tindakannya antara lain yakni, kegigihannya dalam membela kaum minoritas seperti membela Ahmadiyah, Syiah, Darul Arqam, Kristen. Inul Daratista, dan lain-lain. Ketika ada kelompok minoritas diperlakukan tidak adil, maka Abdurrahman Wahid tampil melakukan pembelaan.

Menurut Alwi Shihab untuk memahami pluralisme dengan benar, perlu diketahui konsep pluralisme (Shihab, 1999: 41-42), meliputi :

Pluralisme adalah keterlibatan aktif terhadap kenyataan majemuk;

Keadilan, kebebasan beragama, kebebasan berfikir merupakan konsep pemikiran pluralisme KH. Abdurrahman Wahid yang telah pada tahap dilakukan, yakni melalui kebijakan – kebijakan yang diambilnya diantaranya KH. Abdurrahman Wahid berjuang membela kelompok minoritas seperti kelompok etnis Tionghoa yang semasa Orde Baru dikucilkan KH. Abdurrahman Wahid pun mengambil kebijakan dengan menetapkan tahun baru Imlek sebagai hari libur opsional serta tindakan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa. Kemudian kebijakan lainnya pengusulan pencabutan Tap MPRS No XXV/ 1966 yakni guna membangun Indonesia baru yang damai tanpa prasangka, bebas dari kebencian serta diskriminatif. Lalu pembelaan terhadap hak ahmadiyah dan syi'ah dan kebijakan lainnya. Pluralisme bukanlah kosmopolitisme yang merujuk kepada realitas keanekaragaman suku bangsa dan ras, tetapi tidak ada interaksi positif antar kelompok tersebut; kosmopolitanisme dalam pandangan KH. Abdurrahman Wahid merupakan gambaran Islam yang mencerminkan keluasan dan kematangan wawasan serta pandangan dalam keberislaman seseorang. Keluasan dan kematangan tersebut dapat tercermin dalam keterbukaan sikap yang dengan sendirinya akan melahirkan sifat inklusif, toleran, moderat, serta responsif terhadap perkembangan dan perubahan Zaman. Dengan sifat-sifat tersebut, maka Islam akan mampu mensejajarkan posisi

dengan bangsa-bangsa lain dalam menyikapi kemajuan teknologi.

Pluralisme bukanlah relativisme; Pluralisme menurut Gus Dur bukanlah bermaksud untuk menyamaratakan agama, tetapi menyamaratakan hak setiap individu. Setiap individu memiliki hak yang sama walau berbeda keyakinan. Perlu digaris bawahi, pluralisme bukan untuk mengurus keyakinan tiap individu, keyakinan dan pluralisme adalah dua hal yang berbeda. Keyakinan adalah sesuatu yang ada dalam hati kita, sementara pluralisme adalah cara untuk berhubungan baik dengan masyarakat yang penuh perbedaan keyakinan. Sudah sepatutnya setiap orang meyakini bahwa agamanya adalah agama yang terbaik dari segala agama.

Pluralisme juga bukan sinkritisme yang cenderung melahirkan kepercayaan atau keyakinan baru; Oleh karena itu perlu dibangun pemahaman pluralisme dengan benar pluralisme tidak bertujuan untuk membangun keseragaman bentuk agama, Pluralisme bagi Gus Dur bukanlah mencampuradukkan agama atau Sinkretisme. Pola pikir yang mengarah pada sinkritisme agama ini tidak menghargai keunikan beragama. Pola pikir ini menentang pereduksian nilai-nilai luhur agama, apalagi meleburkan satu agama dengan agama lainnya, demikian juga meyakinkan atau menganggap agama itu satu, yang berani singularisme. Yang dituntut Gus Dur bukanlah menyamakan semua agama, tetapi bentuk pengakuan kesetaraan agama di satu pihak dan perlakuan adil nondiskriminatif dari Negara.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai Pemikiran Pluralisme KH. Abdurrahman Wahid Dalam Membangun Toleransi

(1999-2001), maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

Di Indonesia pluralisme masih menjadi wacana yang sensitif dan dapat mengundang kontroversi. Bagi mereka yang pro, pluralisme merupakan suatu keniscayaan yang sudah menjadi ketentuan Allah SWT. Karena itu pluralisme harus diterima dan menjadi suatu keharusan. Sementara bagi mereka yang kontra, pluralisme dipahami sebagai paham yang sesat karena mengajarkan semua agama sama dan benar. Dalam hal ini KH. Abdurrahman Wahid menjadi salah satu tokoh yang pro terhadap pluralisme ini.

Bagi KH. Abdurrahman Wahid pluralisme bukanlah suatu konsep yang negatif. Pluralisme sejalan dengan nilai Islam, Pancasila dan juga konstitusi negara. Baginya pluralisme adalah fakta dan menjadi suatu keharusan karena perbedaan primordial antar manusia ke dalam berbagai agama, ras, suku, daerah, bahasa yang tak mungkin dihindari dan semua harus diperlakukan setara dalam semua dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jika dipetakan pemikiran KH. Abdurrahman Wahid mengenai pluralisme secara garis besar terbagi kepada tiga hal yaitu; Keadilan, kebebasan beragama, dan kebebasan berfikir atau kebebasan berpendapat sebagai hak asasi manusia. Pemikiran Gus Dur tentang pluralisme telah memberikan kita sebuah pelajaran bahwa sebagai umat manusia yang majemuk harusnya kita dapat saling menghargai tanpa membedakan suku, ras dan agama, namun sayang jalan yang digunakan Gus Dur dalam usahanya membangun pluralitas lewat kebijakan dan tindakannya di dalam masyarakat menuai pro dan kontra. Banyak yang setuju dan banyak pula pihak yang tidak menyetujuinya oleh karena itu ia banyak

mendapat cekalan dari berbagai pihak termasuk fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa paham Pluralisme haram karna menganggap semua agama itu sama. Walaupun demikian penulis tidak memungkiri banyak kelemahan dan kecerobohan yang dilakukan Gus Dur namun hal itu tidak terlepas dari sifat kemanusiaannya yang tidak luput dari kesalahan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penelitian tentang Pemikiran Pluralisme KH. Abdurrahman Wahid Dalam Membangun Toleransi (1999-2001) ialah:

1. Dengan adanya skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai pluralisme, khususnya mengenai pemikiran pluralisme KH. Abdurrahman Wahid.
2. Penulis berharap alangkah baiknya jika penelitian mengenai pluralisme ini ada yang melanjutkan dengan lebih komprehensif sehingga penelitian yang dilakukan dapat lebih mendalam. Tema pluralisme menjadi aktual lantaran maraknya kasus intoleransi di tengah masyarakat Indonesia. Di negara yang beragam seperti Indonesia, tema pluralisme akan menjadi bantuan berharga dalam upaya memahami keberagaman demi menjaga harmoni dalam masyarakat yang majemuk ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, M. (1999). Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993). Yogyakarta: Tiara Wacana.

- Abdillillah, M. (2010). *Memahami Gagasan dan Tindakan Kontroversial Gus Dur*. Jakarta: Buku Kompas.
- Adam, A. R. (2005, juli 18). *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*. Dipetik Agustus 20, 2020, dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI): <http://lipi.go.id/berita/gus-dur-pahlawan-ham/642>
- Adnan, S. A. (2017, Desember 20). *Medcom.id*. Retrieved September 21, 2020, from *Medcom.id*: <https://www.medcom.id/pilar/intervieu/gNQy4PaNgus-dur-bukan-pembela-minoritas>
- Akbar, C. (2002, Desember 04). *Nasional*. Retrieved Maret 07, 2021, from <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2002/12/04/279/dinilai-menghina-islam-ulil-dikecam-ulama.html>
- Alawi, A. (2019, Januari 01). *Fragmen*. Retrieved Maret 06, 2021, from NU Online: <https://www.nu.or.id/post/read/100953/gus-dur-penggerak-islamindonesia>
- Asadillah, A. (2015, Desember 15). *Muslim Moderat*. Retrieved September 21, 2020, from *MuslimModerat*: <http://www.muslimmoderat.com/2015/12/gusdur-harus-yakin-agama-islam-yang-benar.html?m=1>
- A'la, A. (2005). *Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam: Bingkai Gagasan yang Berserak*. Bandung: Nuansa.
- Arif, S. (2008). *Orientalis & Diabolisme Pemikiran*. Jakarta: Germa Insani Press.
- Aziz, M. (2020, juli 05). *Gusdurian.net*. Dipetik Agustus 24, 2020, dari *Kampung Gusdurian*: <https://gusdurian.net/gus-dur-dan-yasser-arafat-manuverdiplomatik-membela-palestina/>
- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bakker, A., & Zubair, A. C. (1990). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Barton, G. (2003). *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. Yogyakarta: LKiS.
- Baso, A. (2006). *NU Studies: Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo Liberal*. Jakarta: Erlangga.
- Basuni, A. (2016). *Aktualisasi Pemikiran Pluralisme KH. Abdurrahman Wahid*. Yogyakarta: Deepublish.
- Basyir, M. (April 2016). *Pembelaan Gus Dur Terhadap Keesatan Ahmadiyah*. *RELIGIA* Vol. 19 No. 1, 35-63.
- Biyanto. (2009). *Pluralisme Keagamaan Dalam Perdebatan*. Malang: UMM Press.
- Budhy Munawar, R. (2001). *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*. Jakarta: Paramadina.
- Cahyo, A. N. (2014). *Salah apakah gus dur ? misteri dibalik pelengserannya*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Choirie, E. (2010). *Sejuta Gelar Untuk Gus Dur*. Jakarta: Pensil-234.
- Darwis, E. K. (2010). *Gus Dur NU dan Masyarakat Sipil*. Yogyakarta: LKiS.
- DeMott, J. (2013). *Principled Pluralism: Report of Inclusive America Project*. Washington D.C: The Aspen Institute .
- Dharmawan, B. (2007). *Gus Dur Menjawab Kegelisahan Rakyat*. Jakarta: Buku Kompas.
- Faisol. (2011). *Gus Dur dan Pendidikan Islam*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Fealy, G. (2010). *Gila Gus Dur; Wacana Pembaca Abdurrahman Wahid*. Yogyakarta: LKiS.

- Hamid, M. (2010). Gus Gerr. Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- Hamid, M. (2014). Jejak Sang Guru Bangsa. Yogyakarta: Galang Pustaka.
- Haq, H. (2009). Islam Rahmah Untuk Bangsa. Jakarta: RMBook.
- Hidayat, K., & AF, A. G. (1998). Passing Over: Melintas Batas Agama. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hidayati, T. W. (2008). Apakah Kebebasan Beragama = Bebas Pindah Agama?: Perspektif Hukum Islam dan HAM. Salatiga: STAIN Salatiga Press.
- Hikam, M. A. (1999). Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman. Jakarta: Kompas.
- Ismail, f. (2002). Pijar-Pijar Islam: Pergumulan Kultur dan Struktur. Yogyakarta: LESFIYogya.
- Iswahyudi. (2016). Pluralisme Islam Pribumi. Yogyakarta: STAIN Po Press.
- Khadduri, M. (1999). Teologi Keadilan: Perspektif Islam. Surabaya: Risalah Gusti.
- Machsin. (2011). Islam Dinamis, Islam Harmonis: Lokalitas, Pluralisme, Terorisme. Yogyakarta: LKiS.
- Madji, M. R. (2012). Jurus Dewa Mabuk Ala Gus Dur. Jombang: Pustaka Tebuireng.
- Madjid, N. (2000). Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern; Respons dan Transformasi Nilai-Nilai Islam Menuju Masyarakat Madani . Jakarta: Mediacita.
- Maemoen, M. N. (2010). Membuka Kedok Tokoh-Tokoh Liberal Dalam Tubuh NU. Rembang: Toko Kitab Al-Anwar.
- Ma'rif, M. S. (2000). Gila Gus Dur. Yogyakarta: LKiS.
- Martono, N. (2015). Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Raja Grafindo.
- Masdar, U. (2005). Gus Dur Pecinta Ulama Sepanjang Zaman, Pembela Minoritas Etnis-Keagamaan. Yogyakarta: KLIK.R.
- Misrawi, Z., & Novriantoni. (2005). Doktrin Islam Progresif Memahami Islam Sebagai Ajaran Rahmat. Jakarta: LSIP.
- Mu'im, A. (2000). Islam di Tengah Arus Transisi. Jakarta: Kompas.
- Muhammedi. (Juli-Desember 2017). Pemikiran Sosial dan Keislaman Nurcholis Madjid. JURNAL TARBIYAH, Vol 24, No. 2.
- Munawar, B. (2015). Membela Kebebasan Beragama. Jakarta: LSAF.
- Nakha'i, I. (2011). Fiqh Pluralis: Telaah Terhadap Relasi Muslim dan Non Muslim Dalam Kitab Kuning. Jakarta: Pulitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI.
- N.G, A. Z. (1999). Gus Dur Siapasih Sampeyan: Tafsir Teoritik Atas Tindakan dan Pernyataan Gus Dur. Jakarta: Erlangga.
- Noer, D. (2003). Islam dan Masyarakat. Jakarta: Yayasan Risalah.
- Nurdjana, I. (2009). Hukum dan Aliran Menyimpang di Indonesia: Peran Polisi Bakorpakem & Pola Penanggulangan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pekei, T. (2013). Gus Dur, Guru dan Masa Depan Papua: Hidup Damai Lewat Dialog. Jakarta: Pustaka Sinar harapan.
- Qorib, M. (2019). Pluralisme Buya Syafi'i maarif: Gagasan dan pemikiran sang guru bangsa. Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara.
- Rachman, B. M. (2010). Reorientasi Pembaruan Islam: Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme Paradigma Baru Islam Indonesia. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat & Paramadina.
- Ridwan, N. K. (2019). Ajaran-Ajaran Gus Dur: Syarah 9 Nilai Utama Gus Dur. Yogyakarta: Noktah.

- Rumadi. (2010). *Damai Bersama Gus Dur*. Jakarta: Kompas.
- Sangadji, E. M. (2010). *Metode Penelitian Dalam Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Malang: CV Andi Offset.
- Santoso, L. (2004). *Teologi Politik Gus Dur*. Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Shihab, A. (1999). *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*. Bandung: Mizan.
- Sholehuddin. (2010). *Pluralisme Agama dan Toleransi*. Jakarta: Binamuda.
- Sobary. (2010). *Jejak Guru Bangsa Mewarisi Kearifan Gus Dur*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Suaedy, A. (2009). *Islam Indonesia Gerakan Baru Demokratisasi: Perspektif Pesantren*. Jakarta: Wahid Institute.
- Suaedy, A. (2018). *Gus Dur, Islam Nusantara, dan Kewarganegaraan Bineka*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sudiarjo. (1994). *Dialog Intra Religious*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugandi, D. (1999, Oktober 22). *Gus Dur Mampu Redam Gejolak*. Koran Harian Umum Pikiran Rakyat, hal.1
- Sugiharto, B. (2000). *Pluralisme Agama dan Ketuhanan Manusia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sukmadinata, N. S. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rusdakarya.
- Sururin. (2005). *Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam: Bingkai Gagasan Yang Berserak*. Bandung: Nuansa.
- Suryadinata, L. (2010). *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Taher, E. P. (2009). *Kebebasan Beragama: Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi*. Jakarta: ICRP Kerja Sama Kompas.
- Tillman. (2004). *Pendidikan Nilai Untuk Kaum Muda Dewasa*. Jakarta: Grasindo.
- Toha, A. M. (2005). *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis*. Jakarta: Perspektif.
- Wahid, A. (1981). *Muslim di Tengah Pergumulan*. Jakarta: 1981.
- Wahid, A. (1999). *Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman*. Jakarta: Kompas.
- Wahid, A. (1999). *Tuhan Tidak Perlu Dibela*. Yogyakarta: LKiS.
- Wahid, A. (2006). *Islamku Islam Anda Islam Kita*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Wahid, A. (2007). *Islam Kosmopolitan; Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Wahid, A., & Ikeda, D. (2010). *Dialog Peradaban Untuk Toleransi dan Perdamaian*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Waskito, A. M. (2010). *Cukup 1 Gus Dur Saja*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Wijoyo, K. (1997). *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan.
- Yusuf, M. (2004). *Islam dan Budaya Lokal*. Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga.
- Zarkasyi, H. F. (2009). *Liberalisasi Pemikiran Islam: Gerakan Bersama Orientalis dan Kolonialis*. Gontor: CIOE-ISID-Gontor.
- Zastrauw, A. (1999). *Gus Dur, Siapa sih Sampeyan ? Tafsir Teoritik atas Tindakan dan Pernyataan Gus Dur*. Jakarta: Erlangga.